

1. SOP Pembuatan Surat Keputusan Tanggap Darurat



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEDARURATAN

SUBBID PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau H. Edwar Sanger, SH, MSi NIP. 19610212 198908 1 001
Nama SOP	Pembuatan Surat Keputusan Tanggap darurat

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
6. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 17 tahun 2013)
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.
8. Peratura Gubernur Riau Nomor 43 tahun 2015 tentang Uraian Tugas badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

Kualifikasi Pelaksana

- Tamatan S1, dengan ketentuan :
1. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan hukum
 2. Memiliki kemampuan dalam merangkum kebutuhan dan merangkum penetapan keputusan

Keterkaitan

Protap Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla

Peralatan/ Perlengkapan




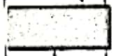
Komputer /Laptop, Draft SK, Data Bencana

Peringatan




Jika SK penetapan tanggap darurat tidak dapat dikeluarkan dalam waktu yang sesegera mungkin pada masa bencana, maka dikhawatirkan respon yang lamban dalam penanggulangan bencana

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai arsip

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan	
		JFU	Kasi	Kabid	Sekre	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu		Output
1	JFU membuat konsep surat keputusan tanggap darurat Gubernur dan diserahkan kepada kabid kedaruratan						Dokumen Sk terdahulu	15 menit	Konsep surat	
2	Kasi Kedaruratan memeriksa konsep surat keputusan tanggap darurat Gubernur, jika sudah benar maka akan diparaf dan diserahkan kepada kabid kedaruratan, jika belum benar maka akan dikembalikan ke JFU	tidak		ya			Konsep Surat keputusan Tanggap darurat	5 menit	Konsep SK Tanggap darurat yg sudah diparaf oleh Kasi	
3	Kabid Kedaruratan memeriksa konsep surat keputusan tanggap darurat Gubernur, jika sudah benar maka akan diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris, jika belum benar maka akan dikembalikan ke kasi kedaruratan		tdk				Konsep SK Tanggap darurat yg sudah diparaf oleh Kasi	15 mnt	Konsep SK Tanggap darurat yg sudah diparaf oleh Kabid	
4	Sekretaris menerima dan memaraf konsep surat keputusan tanggap darurat Gubernur, kemudian menyerahkan nya kepada kepala pelaksana						Konsep SK Tanggap darurat yg sudah diparaf oleh Kabid	2 menit	Konsep SK Tanggap darurat yg sudah diparaf oleh Sekretaris	

19

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		JFU	Kasi	Kabid	Sekre	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Kepala Pelaksana menerima dan memaraf konsep surat keputusan tanggap darurat Gubernur kemudian menyerahkan kembali kepada JFU						Konsep SK Tanggap darurat yg sudah diparaf oleh Sekretaris	10 menit	Konsep SK Tanggap darurat yg sudah diparaf oleh Kalak	
6	JFU mengirimkan konsep surat keputusan tanggap darurat Gubernur yang sudah diparaf oleh kepala pelaksana kepada kepala bagian umum sekretariat daerah						Konsep SK Tanggap darurat yg sudah diparaf oleh Kalaksa	20 mnt	konsep SK Tanggap darurat Gubernur	
7	JFU menerima dan mengandakan surat keputusan Gubernur yang sudah ditandatangani oleh Gubernur						SK yang sudah ditandatangani oleh Gubernur	2 hari	Arsip SK yang sudah ditandatangani oleh Gubernur	Terkait SOP yang berlaku di Setda

12